



**RENCANA KERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

**JL. JEND. SUDIRMAN NO 199 SUKOHARJO KODE POS  
57521**

**Telp (0271) 593068 Fax (0271) 593335**

**Website : [www.bkd.sukoharjokab.go.id](http://www.bkd.sukoharjokab.go.id) Email :**

**[bkd@sukoharjokab.go.id](mailto:bkd@sukoharjokab.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dapat tersusun.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perumusan Renja dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah

Kedepannya, Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyusunan renja ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Sukoharjo, September 2021

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**SUMINI, SE, MM**

Pembina

NIP. 19681021 199403 2 010

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan renja skpd;
- b. Penyusunan rancangan renja skpd;
- c. Pelaksanaan forum skpd; dan
- d. Penetapan Renja SKPD.

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
2. Orientasi mengenai Renja SKPD;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disusun :

1. Mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Mengacu pada Renstra SKPD;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan

5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD terdiri atas:

1. Perumusan rancangan Renja SKPD, yang terdiri atas :

Persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran pelayanan SKPD provinsi;

Mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ;

Penelaahan rancangan awal RKPD;

Perumusan tujuan dan sasaran;

Penelaahan usulan masyarakat; dan Perumusan kegiatan prioritas.

2. Penyajian rancangan Renja SKPD, yang terdiri atas :

Pendahuluan;

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan

Penutup.

Pelaksanaan forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bapelbangda membahas rancangan Renja RKPD . Pembahasan rancangan Renja RKPD mencakup:

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota;
2. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD provinsi;
3. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD provinsi; dan
4. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.

Penetapan Renja SKPD sebagaimana dalam poin d meliputi tahapan :

1. Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
2. Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bapelbenda untuk diverifikasi.
3. Verifikasi memastikan rancangan Renja SKPD provinsi telah sesuai dengan RKPD provinsi.
4. Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD provinsi yang telah sesuai dengan RKPD provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD adalah :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Manajemen Kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan kabupaten Sukoharjo 2021 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan adalah untuk menjabarkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten sukoharjo Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara

perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II      EVALUASI      PELAKSANAAN      RENJA      BKPP KABUPATEN JAWA TENGAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026
- 2.1. Analisa Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Sukoharjo
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP Kabupaten Sukoharjo
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III      TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja BKPP Kabupaten Sukoharjo
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD**

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo capaian tahun berjalan (2021) dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui, namun terdapat juga beberapa target yang tidak tercapai. Faktor tidak tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain disebabkan oleh regulasi maupun kondisional, menyangkut tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo sebagai unsur pelayanan di bidang kepegawaian. Secara keseluruhan dinamika penguasaan capaian merupakan kebutuhan didalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

**Tabel 2.1**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KAB. SUKOHARJO**

**OPD**

**Jumlah Total Belanja Langsung Tahun 2020 : 8.652.492.000**

**Realisasi Belanja Langsung Tahun 2020 : 6.953.730.720**

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Indikator Kinerja Output</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	A. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (K.1)							1 keg
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	4.808.000	4.104.600	85,37%	SPPD dalam daerah sisa karena pandemi		

	<b>OUTPUT :</b>						
	Terwujudnya kelancaran dalam pengiriman surat dan administrasi perkantoran	surat	6.000	8.846	147,43%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Kelancaran Tugas Kantor	%	100%	100%	100,00%		
	<b>B. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik (K.2)</b>						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	35.000.000	25.125.250	71,79%	Dibayar sesuai dengan penggunaan, tagihan telepon masih sedikit karena Kepala Badan belum definitif	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terbayarnya pajak telepon dan sewa provider SAPK	rekening	2	2			
	<b>OUTCOMES :</b>						

	Terwujudnya kelancaran proses administrasi kepegawaian	%	100	100	100,00%		
	C. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ( K. 3 )						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	168.175.000	153.535.000	91,29%	Karena adanya rasionalisasi anggaran, honor pengelola keuangan turun	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan SKPD	Orang	17	17	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	%	100	100	100,00%		
	D. Penyediaan Alat Tulis Kantor (K.4)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	63.533.000	62.110.000	97,76%	Kegiatan rutin tidak ada	

						permasalahan	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	56	56	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya pelaksanaan kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%		
	E. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (K.5)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	54.745.000	54.744.800	100,00%	kegiatan rutin tidak ada permasalahan	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	lembar	123.650	123.661	100,01%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	%	100	100	100,00%		

F	Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga (K.6)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	176.559.000	158.505.000	89,77%	Efisiensi anggaran dan pengurangan gaji THL karena banyak hari libur	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor yang memadai	meterpersegi	525	525	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya Kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%		
G	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (K.7)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	4.850.000	4.220.000	87,01%	Karena banyak hari libur, pengiriman surat kabar tidak full satu bulan	
	<b>OUTPUT :</b>						

	Tersedianya bahan bacaan dinas	jenis	2	2	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terserapnya Informasi	%	100	100	100,00%		
H	Penyediaan Makanan dan Minuman (K.8)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	56.560.000	43.620.000	77,12%	Karena pandemi covid-19 beberapa kegiatan tidak terlaksana	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya makanan dan minuman	Orang	14.016	13.854	98,84%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya pelaksanaan kegiatan kantor	%	100	100	100,00%		
I	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (K.9)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						

	Dana	Rupiah	179.248.000	172.478.900	96,22%	Karena adanya pandemi covid-19	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya fasilitas untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah	Kali	141	137	97,16%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
A	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (K.10)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	578.750.000	562.400.000	97,17%	kegiatan tidak ada permasalahan	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya kendaraan dinas roda 4	unit	2	2	100,00%		
	Tersedianya kendaraan dinas roda 2	unit	3	4	133,33%	???	
	<b>OUTCOMES :</b>						

	Lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%		
B	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (K.11)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	768.150.000	731.884.100	95,28%	kegiatan tidak ada permasalahan, efisiensi anggaran	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak	unit	36 unit laptop, 1 unit PC, 1 unit speaker aktif, 2 unit microphone, 11 unit printer, 7 unit TV layar datar, 1 unit scanner, 1 unit kamera, 1 unit tripod, 6 unit HT	36 unit laptop, 1 unit PC, 1 unit speaker aktif, 2 unit microphone, 11 unit printer, 7 unit TV layar datar, 1 unit scanner, 1 unit kamera, 1 unit tripod, 6 unit HT	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya pelaksanaan Kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%		
C	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional (K.12)						1 keg

	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	168.714.000	154.715.246	91,70%	BBM sisa karena Kepala OPD belum definitif		
	<b>OUTPUT :</b>							
	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	unit	35	32	91,43%			
	<b>OUTCOMES :</b>							
	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%			
	D Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ( K.13)							1 keg
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%	kegiatan rutin tidak ada permasalahan		
	<b>OUTPUT :</b>							
	Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	jenis	1	1	100,00%			

	<b>OUTCOMES :</b>						
	Meningkatnya kenyamanan kerja	%	100	100	100,00%		
E	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor ( K.14 )						
	<b>INPUT :</b>						1 keg
	Dana	Rupiah	28.948.000	28.948.000	100,00%	kegiatan rutin tidak ada permasalahan	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Jenis	2	2	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor	%	100	100	100,00%		
F	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur ( K.15 )						1 keg
	<b>INPUT :</b>						

	Dana	Rupiah	1.500.000	1.496.000	99,73%	kegiatan rutin tidak ada permasalahan	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terlaksananya pemeliharaan rutin mebelair	Jenis	3	3	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terpeliharanya mebelair	%	100	100	100,00%		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
A	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (K.16)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	25.650.000	-	0,00%	Karena pengadaan seragam gagal lelang	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terwujudnya Pakaian Dinas harian beserta atributnya	stel	76	0	0,00%		

	<b>OUTCOMES :</b>						
	Meningkatnya Disiplin Aparatur PNS	100%	100	100	100,00%		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
	A Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (K.17)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	4.751.000	4.718.900	99,32%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya Laporan keuangan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Tercapainya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	%	100	100	100,00%		
	B Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran						2 keg

	(K.18)						
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	5.000.000	-	0,00%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran	Laporan	2	2	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya tertib laporan keuangan semesteran	Laporan	2	2	100,00%		
C	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun (K.19)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	5.000.000	3.807.000	76,14%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun	laporan	1	1	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						

	Terwujudnya tertib laporan keuangan akhir tahun	laporan	1	1	100,00%		
5	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
A	Penyelenggaraan Forum SKPD (K.20)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	20.143.000	19.720.400	97,90%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terlaksananya Forum SKPD	kali	1	1	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	%	100	100	100,00%		
B	Penyusunan Dokumen Perencanaan (K.21)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	18.300.000	10.579.000	57,81%	Karena adanya pandemi Covid-19 maka belanja	

						sewa tidak terserap	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersedianya dokumen perencanaan	Dokumen	3	3	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan	%	100	100	100,00%		
6	Program Pendidikan Kedinasan						
	A Pendidikan Penjejang Struktural (K.22)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	477.362.000	407.717.250	85,41%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Mengirim Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	Orang	2	2	100,00%		

	Mengirim Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	10	8	80,00%	Untuk Pelatihan Administrator karena adanya pandemi covid-19 BPSDMD Prov Jateng mengurangi volume kegiatan dan Kab. Sukoharjo mendapat kuota 8 orang	Tahun 2021 untuk peserta didaftarkan ke BPSDMD sesuai dengan jumlah peserta dan jumlah anggaran
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	30	-	0,00%	Untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sudah dilaksanakan selama 6 hari dengan metode on class, karena pandemi covid-19 maka kegiatan dihentikan	Kegiatan dilanjutkan Tahun 2021 disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kemungkinan menggunakan metode e-learning
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon II, III, dan IV	%	100	100	100,00%		
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						

A	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN (K.23)							2 keg
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	181.130.000	168.365.500	92,95%			
	<b>OUTPUT :</b>							
	- Terbitnya Surat Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik	SK	300	87	29,00%	Capaian sesuai dengan permohonan yang masuk		
				Surat Ijin Belajar : 45 Tugas Belajar : 3 Surat Keterangan memiliki ijazah : 7 Surat Keterangan penggunaan gelar akademik : 32				
	Terlaksananya ujian Dinas dan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	orang	120	47	39,17%	Rencana dalam satu tahun 2x realisasi 1x karena pandemi		
				Ujian Dinas : 22 org UKPPI (Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah) : 25 org				

	Terlaksananya sumpah janji PNS	orang	450	423	94,00%			
	<b>OUTCOMES :</b>							
	Terwujudnya Kelancaran Proses Pembinaan Karier Pegawai	Satker	100%	100%	100,00%			
B	Seleksi Pengadaan ASN (K.24)							1 keg
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	1.364.520.000	1.022.851.089	74,96%	Tahapan proses mengusulkan pengadaan banyak mengalami penundaan karena pandemi covid 19	Pelaksanaan SKB dengan protokol kesehatan	
	<b>OUTPUT :</b>							
	Terlaksananya penyelenggaraan ujian seleksi CPNS	orang	10.000	9.361	93,61%			
	<b>OUTCOMES :</b>							
	Terpenuhinya formasi CPNSD	orang	100	100	100,00%			

C	Penempatan ASN (K.25)							1 keg
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	58.000.000	41.004.840	70,70%	Formasi CPNS Tahun 2020 baru menerima SK Tahun 2021	Segera mengeluarkan SK CPNS setelah NIP dari BKN terbit	
	<b>OUTPUT :</b>							
	Terbitnya SH	orang	394	394	100,00%			
	Pengangkatan CPNS ke PNS			Mutasi intern Kab : 139 orang , Mutasi Ekstem Kab : 7 orang				
	<b>OUTCOMES :</b>							
	Terpenuhinya kebutuhan pegawai	%	100	100	100,00%			
D	Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (K.26)							
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	100.000.000	54.130.901	54,13%	Karena ada kegiatan yang tidak jadi		

						terlaksana karena adanya pandemi covid-19	
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersusunnya data kepegawaian ASN Kab Sukoharjo	record data	8.000	7.128	89,10%		
	Terbitnya buku profil pegawai	buku	5	5	100,00%		
	Terbitnya buku Daftar Urut Kepangkatan	buku	5	5	100,00%		
	Terselenggaranya bimtek e-personal bagi CPNS	kegiatan	1	-	0,00%	Karena penerimaan SK CPNS mundur di tahun 2021 jadi tidak terealisasi	
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Tersedianya data informasi manajemen kepegawaian daerah	PNS	100,00%	100%	100,00%		
E	Proses Penanganan Kasus- Kasus Kepegawaian (K.27)						3 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah			90,03%		

			88.586.000	79.756.900			
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terselesainya keputusan hukuman disiplin	SK	8	21	262,50%		
	Terselesainya keputusan ijin/keterangan cerai	SK	14	11	78,57%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya Kepastian Hukum bagi pelanggar disiplin, Terselesaikannya Surat Ijin/ Surat Keterangan melakukan perceraian, Terselesaikannya kasus-kasus disiplin PNS/ kasus pidana	SK	22	32	145,45%		
F	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan (K.28)						
	<b>INPUT :</b>						1 keg
	Dana	Rupiah	1.016.012.000	999.920.563	98,42%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terselenggaranya/Terkirimnya peserta Diklat Teknis	orang	100	218	218,00%		

	dan Fungsional						
				- pengiriman diklat teknis dan fungsional : 5 org			
				- pengiriman pelatihan bidang TIK Program Web Programing : 35 org			
				- Pelatihan Manajemen Kearsipan : 40 org			
				- Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis ... : 40 org			
				- Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua : 40 org			
				- Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Barang/ Jasa : 21 org			
				- Pelatihan Budaya Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil : 37 org			
	<b>OUTCOMES :</b>						

	Terselenggaranya/terkirimnya Diklat Teknis dan fungsional lainnya	%	100	218	218,00%		
G	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (K.29)						4 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	196.400.000	173.799.800	88,49%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	- Terselenggaranya pembinaan administrasi/ Disiplin	kegiatan	25	33	132,00%		
	- Terkirimnya LP2P	PNS	7.138	8.744	122,50%		
	- Terselenggaranya sosialisasi LP2P	kali	1	1	100,00%		
	-Terkirimnya daftar hadir	dokumen	120	120	100,00%		
	Terlaksananya pemantauan pegawai pada jam kerja di Instansi/fasilitas umum	kgt	16	16	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						

	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian secara optimal	%	100	100	100,00%		
H	Kenaikan Pangkat Non Fungsional (K.30)						3 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	83.474.000	71.107.000	85,18%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Non Fungsional	SK	313	313	100,00%	- Banyak PNS yang pensiun dan pangkat sudah banyak yang mencapai puncak	
	Terselenggaranya rakor kenaikan pangkat non fungsional	Kgt	1	1	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya kelancaran proses Kenaikan Pangkat Non Fungsional	%	100	100	100,00%		
I	Kenaikan Pangkat Fungsional (K.31)						3 keg

	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	90.300.000	74.721.800	82,75%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Fungsional	SK	763	763	100,00%		
	Terselenggaranya rakor KP Fungsional	Kegiatan	2	2	100,00%		
	Terselenggaranya sosialisasi KP Fungsional	Kegiatan	3	3	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya kelancaran proses Kenaikan Pangkat Fungsional	%	100	100	100,00%		
J	Kenaikan Gaji Berkala (K.32)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	24.999.000	24.029.500	96,12%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala	SK	4.000	4.000	100,00%		
	<b>OUTCOMES :</b>						

	Terwujudnya kelancaran proses Kenaikan Gaji Berkala PNS	%	100	100	100,00%		
K	Pengangkatan Dalam Jabatan (K.33)						2 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	1.147.016.000	516.795.544	45,06%	Karena adanya pandemi covid 19	
	<b>OUTPUT :</b>						
	- Terlaksananya pengambilan sumpah janji/ pelantikan pejabat struktural	kali	4	4	100,00%	Mutasi pejabat bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada harus ijin kemendagri	Mengajukan ijin ke Kemendagri
	- Terwujudnya administrasi Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan	orang	150	-	0,00%		
				Pengangkatan pertama :			
				Pejabat Struktural :			
				kepala sekolah :			
				pemberhentian jabatan:			

	dan THT secara otomatis						
Q	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah (K.39)						1 keg
	<b>INPUT :</b>						
	Dana	Rupiah	72.875.000	70.075.250	96,16%		
	<b>OUTPUT :</b>						
	Tersusunnya informasi data Kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan BKN	orang	8.000	7.128	89,10%		
	<b>OUTCOMES :</b>						
	Terwujudnya informasi data PNS yang sinkron dengan data BKN	%	100	100	100,00%		
8	Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur						

A	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah (K.40)							1 keg
<b>INPUT :</b>								
	Dana	Rupiah	34.629.000	18.033.500	52,08%	Karena pandemi covid 19 anggaran tidak terserap karena kegiatan tidak jadi dilaksanakan		
<b>OUTPUT :</b>								
	Rapat koordinasi terkait pengirimnya/pelaksanaan Diklat Prajabatan/Latsar	kali	3	1	33,33%	Untuk koordinasi dengan lembaga Pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi karena adanya pandemi korona jadi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan	Tahun 2021 dilakukan koordinasi sesuai dengan kondisi pandemi dan dilakukan penganggaran yang lebih cermat	
<b>OUTCOMES :</b>								
	Terlaksananya rapat koordinasi terkait pengiriman/pelaksanaan Diklat Prajabatan/latsar	%	100		0,00%			

B	Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Kepegawaian (K.41)							1 keg
	<b>INPUT :</b>							
	Dana	Rupiah	220.225.000	217.591.000	98,80%			
	<b>OUTPUT :</b>							
	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Kepegawaian	orang	110	110	100,00%			
	<b>OUTCOMES :</b>							
	Terwujudnya ASN yang berkompetensi	%	100	100	100,00%			
			<b>8.652.492.000</b>	<b>6.953.730.720</b>	<b>80,37%</b>			

### **2.3 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

#### **a. Sekretariat**

1. Masih kurangnya sumber daya yang proporsional dan keterampilan pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo sehingga kegiatan administrasi perkantoran belum terlaksana secara maksimal;
2. Belum terlaksananya Standart Pelayanan Minimal dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian.

#### **b. Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur**

1. Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.

#### **c. Bidang Mutasi**

1. Kurangnya personil PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka JPT sehingga pelaksanaan seleksi terbuka kurang optimal;
2. Kenaikan jabatan fungsional maupun pengangkatan dalam jabatan fungsional masih belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan ASN karena formasi yang ditetapkan oleh KemenpanRB tidak sebanding dengan formasi yang diusulkan.

#### **d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

1. Masih kurangnya pengetahuan PNS akan pentingnya pengembangan kompetensi melalui Diklat Teknis, sehingga peserta yang mengikuti diklat teknis kadang belum sesuai sasaran;
2. Anggaran yang terbatas sehingga pengadaan dan penyelenggaraan Diklat Manajerial dan Fungsional

belum bisa mengakomodasi seluruh PNS di Kabupaten Sukoharjo.

#### **2.4 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026

##### **a. VISI**

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

##### **b. MISI**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun

2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yang dapat teroptimalisasi dengan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan

pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam quality assurance aparatur.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

##### **4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Sukoharjo 2021 -2026 oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo, maka visi dan misi tersebut dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa rumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya yang diformulasikan kedalam tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam perumusan tujuan strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dapat terwujud.

Selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

**Visi : Terwujudnya Sukoharjo yang Lebih Makmur**

**Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi**

**Tujuan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel**

**Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

**Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang berdaya saing tinggi**

**Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan**

**Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

#### 4.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Dalam perumusan sasaran strategis juga memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dicapai. Untuk itu, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur sehingga apa yang menjadi cita-cita Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 dapat terwujud.

Selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

<b>Visi</b>	<b>:</b>	<b>Terwujudnya Sukoharjo yang Lebih Makmur</b>
<b>Misi 1</b>	<b>:</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi</b>
<b>Tujuan</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel</b>
<b>Sasaran</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik</b>
	<b>:</b>	<b>Meningkatnya kualitas manajemen ASN</b>
<b>Misi 2</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</b>
<b>Misi 3</b>	<b>:</b>	<b>Memperkuat Perekonomian Rakyat yang berdaya saing tinggi</b>
<b>Misi 4</b>	<b>:</b>	<b>Memperkuat Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan</b>
<b>Misi 5</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan</b>

Tabel 4.1.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
 Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Merit	Indeks	Kategori I (Buruk)	Kategori II (Kurang)	Kategori III (Baik)	Kategori III (Baik)	Kategori III (Baik)
				68 (baik)	70 (baik)	72 (baik)	74 (sgt baik)	76 (sgt baik)
	2. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	1) Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	%	87	89	90	93	93
				82,75	84,5	86	87	88,5
		2) Persentase Pengembangan ASN	%					

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator yang Berkaitan Kesekretariatan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Sukoharjo

Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Sistem Merit	Indeks	Kategori I (Buruk)	Kategori II (Kurang)	Kategori II (Kurang)	Kategori III (Baik)	Kategori III (Baik)
	1. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	1) Nilai AKIP	Angka	68 (baik)	70 (baik)	72 (baik)	74 (sgt baik)	76 (sgt baik)

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo**

**OPD : BKPP Kab. Sukoharjo**

Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023							
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
5.03	KEPEGAWAIAN							5.03	KEPEGAWAIAN						
5.03.5.04.0.00.01.00.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	26.311.364.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	27.034.403.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	117.382.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	129.120.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dok	60.809.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dok	66.890.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilakukan	4 kali	7.238.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilakukan	4 kali	7.961.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilakukan	4 kali	7.535.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilakukan	4 kali	8.289.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD yang dilakukan	4 kali	3.300.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD yang dilakukan	4 kali	3.630.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan perubahan DPA-SKPD yang dilakukan	4 kali	3.300.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan perubahan DPA-SKPD yang dilakukan	4 kali	3.630.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 dok	35.200.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.01.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 dok	38.720.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	24.849.871.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	25.426.762.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	452 orang	24.488.423.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	452 orang	25.029.169.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD yang dilakukan pengujian/verifikasi	4 dok	350.448.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD yang dilakukan pengujian/verifikasi	4 dok	385.493.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan	5.500.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	1 laporan	6.050.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	18 laporan	5.500.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.02.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang disusun	18 laporan	6.050.000

Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)							Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023								
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan layanan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	400.043.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan layanan kepegawaian Perangkat Daerah	100%	440.047.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.05.2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan	40 stel	37.043.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.05.2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan	40 stel	40.747.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.05.9				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	130 orang	363.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.05.9				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	130 orang	399.300.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	423.575.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	465.932.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan rumah tangga kantor yang	16 jenis	30.500.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan rumah tangga kantor yang	16 jenis	33.550.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	120.700.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	132.770.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang yang dicetak/digandakan	2 jenis	66.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang yang dicetak/digandakan	2 jenis	72.600.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bacaan Dinas yang disediakan	2 jenis	8.239.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bacaan Dinas yang disediakan	2 jenis	9.063.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.8				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis makanan dan minuman tamu yang	2 jenis	2.195.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.8				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis makanan dan minuman tamu yang	2 jenis	2.414.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	141 kali	195.941.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.06.9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	141 kali	215.535.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan layanan penyediaan barang Perangkat Daerah	100%	220.375.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan layanan penyediaan barang Perangkat Daerah	100%	242.413.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07.1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan jabatan yang diadakan/dibeli	0 unit	100.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07.1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan jabatan yang diadakan/dibeli	0 unit	110.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07.5				Pengadaan Mebel	Jenis mebel yang diadakan/dibeli	3 jenis	22.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07.5				Pengadaan Mebel	Jenis mebel yang diadakan/dibeli	3 jenis	24.200.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07.6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	3 jenis	98.375.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.07.6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	3 jenis	108.213.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	73.668.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	81.034.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100%	6.595.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100%	7.254.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	1 jenis	6.600.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	1 jenis	7.260.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08.4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 jenis	60.473.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.08.4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 jenis	66.520.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	226.450.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	249.095.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.09.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis unit kendaraan dinas/jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 jenis	185.985.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.09.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis unit kendaraan dinas/jabatan yang dilakukan pemeliharaan	2 jenis	204.587.000
5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.09.6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	3 jenis	40.462.000	5.03.5.04.0.00.01.00.1.2.09.6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	3 jenis	44.508.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1) Persentase penyelesaian administrasi	100%	3.267.090.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				1) Persentase penyelesaian administrasi	100%	3.753.730.000
				2) Persentase pemenuhan formasi usulan ASN	97%						2) Persentase pemenuhan formasi usulan ASN	97%			
				3) Persentase kekosongan jabatan yang terisi	20%						3) Persentase kekosongan jabatan yang terisi	20%			
				4) Persentase penanganan kasus kepegawaian	80%						4) Persentase penanganan kasus kepegawaian	80%			

Rencana Tahun 2022 (tahun rencana)								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023							
KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi kompetensi Teknis	85%	1.111.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.01			Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase ASN yang memiliki kualifikasi kompetensi Teknis	85%	1.360.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.01.3				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	255 orang	1.090.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.01.3				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	255 orang	1.330.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.01.4				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan diklat teknis yg disusun	4 laporan	21.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.01.4				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan diklat teknis yg disusun	4 laporan	30.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jenis sertifikat kompetensi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang diterbitkan	8 jenis	6.181.270.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jenis sertifikat kompetensi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang diterbitkan	8 jenis	7.018.400.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02.1				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1) Jenis surat ijin yang diterbitkan 2) Jumlah peserta Ujian Dinas dan UKPPI yang dikirim 3) Jumlah dokumen Analisis Kebutuhan Diklat yang disusun 4) Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi	4 jenis 75 orang 1 dok 10 orang	180.270.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02.1				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	1) Jenis surat ijin yang diterbitkan 2) Jumlah peserta Ujian Dinas dan UKPPI yang dikirim 3) Jumlah dokumen Analisis Kebutuhan Diklat yang disusun 4) Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi	4 jenis 75 orang 1 dok 10 orang	200.000.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02.7				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1) Jenis diklat yang diselenggarakan	5 jenis	6.000.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02.7				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1) Jenis diklat yang diselenggarakan	5 jenis	6.788.400.000
5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02.8				Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	1) Jumlah laporan diklat kepemimpinan dan fungsional yg disusun 2) Jumlah laporan Assesment yang dilakukan	5 laporan 1 laporan	21.000.000	5.03.5.04.0.00.01.00.2.2.02.8				Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	1) Jumlah laporan diklat kepemimpinan dan fungsional yg disusun 2) Jumlah laporan Assesment yang dilakukan	5 laporan 1 laporan	30.000.000
					<b>JUMLAH</b>		<b>36.870.724.000</b>						<b>JUMLAH</b>		<b>39.166.533.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2022. Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia. Seluruh elemen pelaksana Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-

masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dengan tersusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.

Sukoharjo, Agustus 2021

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KABUPATEN  
SUKOHARJO,



**SUMINI, SE, MM**

Pembina

NIP. 19681021 199403 2 010